BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan pemerintahan sekarang ini adalah semakin menguatnya tuntutan *good governance*. Untuk mencapai *good governance*, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban ke berbagai pihak yang memerlukan, salah satu cara yang ditempuh Pemerintah Kota Blitar adalah menggunakan suatu sistem aplikasi yang disebut Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SIP APBD) yaitu suatu program aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dengan aplikasi ini, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerahnya secara terintegrasi, dimulai dari penganggaran, penatausahaan, akuntansi hingga pelaporannya.

Dari pengujian melalui pendekatan COBIT diperoleh hasil bahwa kualitas efektivitas sistem, kualitas efisiensi sistem dan penerapan SIP APBD di Pemerintah Kota Blitar telah mencapai level kematangan level 4 *(managed and measurable)*. Berarti tanggung jawab pengelolaan TI secara jelas telah ditentukan, dikelola dan diselenggarakan, telah memiliki prosedur baku formal yang telah disosialisasikan ke segenap jajaran pejabat pelaksana untuk dipatuhi dan

dikerjakan dalam aktivitas sehari-hari. Pemerintah dapat mengukur dan memonitor prosedur yang ada sehingga mudah ditanggulangi jika terjadi penyimpangan. Proses yang ada sudah berjalan dengan baik dan konstan. Otomasi dan perangkat teknologi informasi yang digunakan juga telah memenuhi kebutuhan.

Kemudian dari Uji Simultan dengan F-Test, yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (kualitas penerapan SIP APBD). maka diperoleh hasil bahwa variabel kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas penerapan SIP APBD, dengan indikator f hitung sebesar 58,680 lebih dari f tabel yang bernilai 3,467 sehingga apabila variabel kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem meningkat maka akan semakin meningkat pula kualitas penerapan SIP APBD, begitu pula sebaliknya, jika kualitas efektivitas sistem dan kualitas efisiensi sistem menurun maka kualitas penerapan SIP APBD juga akan menurun .

Dan dari Uji t (parsial) dengan T-test yang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual (parsial) terhadap variabel terikat diperoleh hasil bahwa, t – hitung kualitas efektivitas sistem (9,868) lebih besar dari t-table 2,119 berarti apabila kualitas efektivitas sistem ditingkatkan maka kualitas penerapan SIP APBD akan semakin meningkat pula begitu pula sebaliknya, bila kualitas efektivitas sistem menurun maka kualitas penerapan SIP APBD juga akan menurun. Sedangkan t hitung kualitas

efisiensi sistem (3,053) lebih besar dari t tabel (2,119) ini juga berarti apabila kualitas efisiensi sistem ditingkatkan maka kualitas penerapan SIP APBD akan semakin meningkat, bila kualitas efisiensi sistem menurun maka kualitas penerapan SIP APBD juga akan menurun pula.

B. Saran

Untuk menerapkan sebuah sistem seperti Sistem Informasi Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SIP APBD) tentunya telah melalui proses yang sangat panjang dan pertimbangan yang matang, karena kualitas informasi sistem ini sangat mempengaruhi keberlangsungan pengelolaan keuangan suatu instansi dan juga mempunyai faktor resiko yang tinggi. Tiap tiap sistem berbeda tingkat resikonya tergantung dari ukuran, cakupan, tingkat kompleksitas dan komponen teknis serta organisasional dari sistem. Kemungkinan agar penerapan suatu sistem berhasil dapat ditingkatkan dengan memilih strategi yang tepat.

Makin besar proyek, maka makin besar pula tingkat resikonya. Ukuran besarnya proyek bisa diindikasikan dengan nilai uang yang dikeluarkan, banyaknya pihak (SKPD) yang terlibat dalam implementasi, waktu yang digunakan, dan jumlah unit SKPD yang terpengaruh oleh kegiatan proyek. Karena sulitnya pengelolaan sistem informasi, kemampuan teknis dalam pengoperasian pada saat ini sudah merupakan suatu kecakapan yang sangat diperlukan, oleh karena itu demi peningkatan kualitas penerapan SIP APBD, maka sebaiknya pelatihan-pelatihan bagi para pejabat pelaksana ini perlu diberikan lebih mendalam lagi.

Hal yang juga penting lainnya adalah penambahan template pada aplikasi SIP APBD terutama fitur-fitur yang berkaitan dengan aset barang daerah. Selama ini aplikasi khusus untuk aset belum terintegrasi dengan SIP APBD. Sehingga sistem pelaporannya masih dilakukan secara terpisah. Hal ini menyebabkan dua kali kerja ketika akan membuat laporan inventaris barang daerah. Padahal dasar dari belanja barang-barang tersebut telah ada dalam SIP APBD, yaitu pagu atau plafon anggaran yang tertuang dalam APBD dalam setiap tahun anggaran.

Apabila template ini disediakan terintegrasi dengan SIP APBD, maka akan terasa sekali manfaat yang diperoleh, yaitu hemat waktu, tenaga dan tentunya biaya yang dikeluarkan untuk aplikasi ini lebih juga lebih ringan bila dibandingkan dengan penyediaan aplikasi yang berbeda dengan SIP APBD.